

**PENGARUH KOMITE AUDIT DAN TIPE
KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PADA *AUDIT
FEES***



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

KHARISMA GATI
NIM. 12030111140266

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Kharisma Gati
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140266
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KOMITE AUDIT DAN
TIPE KEPEMILIKAN PERUSAHAAN
PADA *AUDIT FEES***

Dosen Pembimbing : Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 13 Agustus 2015

Dosen Pembimbing,

(Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt)

NIP. 196808271992021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Kharisma Gati
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140266
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KOMITE AUDIT DAN TIPE
KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PADA *AUDIT
FEES***

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 25 Agustus 2015

Tim Penguji :

1. Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Dr. H. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt. (.....)
3. Fuad, S.E.T., M.Si., Ph.D. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Kharisma Gati, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Pengaruh Komite Audit dan Tipe Kepemilikan Perusahaan pada *Audit Fees***, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 13 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

(Kharisma Gati)

NIM. 12030111140266

ABSTRACT

This study aimed to analyze the influence of audit committees and firm ownership type to audit fees on all companies listed on Bursa Efek Indonesia (BEI) in 2013. The existence the audit committee as a mechanism of checks and balances is expected to reduce control risk, so low external audit fees can be achieved.

The sample used is secondary data from the Indonesia Stock Exchange (BEI) is a company's annual report base in 2013 . This study is a modification of the research conducted by Rustam et.al.,(2013). The modification on this study is adding adding several independent variables and reducing several other independent variables. Independent Variable in this study are audit committees size, audit committee activity, committee member's independence, committee member's expertise, private-owned company, and foreign-owned company. This study analyzed by using multiple linear regression analysis method to test hypothesis testing and statistical test statistic t and F. This is because the variables are tested more than one independent variable. Before being conducted the regression test, it is examined by using the classical assumption tests

These results indicate that the variable audit committee's size, audit committee activity, had significant positive effect on audit fees. Variable committee member's expertise had significant negative on audit fees, While the committee member's independence, private-owned company, and foreign-owned company had no significant effect.

Keywords: audit fees, audit committee, firm ownership type, external auditor

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komite audit dan tipe kepemilikan perusahaan pada *audit fees* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2013. Keberadaan komite audit sebagai salah satu mekanisme pengawasan dan pengendalian diharapkan dapat mengurangi dan mengontrol risiko, sehingga *fee* audit eksternal yang rendah dapat dicapai.

Sampel yang digunakan adalah data sekunder dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berupa laporan tahunan perusahaan pada tahun 2013. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rustam *et.al.*, (2013) Modifikasi pada penelitian ini adalah dengan menambahkan beberapa variabel independen dan mengurangi beberapa variabel independen lainnya. Variabel independen pada penelitian ini yaitu ukuran Komite Audit, jumlah rapat Komite Audit, independensi Komite Audit, keahlian Komite Audit, kepemilikan perusahaan BUMN, dan kepemilikan perusahaan asing. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis Regresi Linear Berganda dengan pengujian hipotesis uji statistik t dan uji statistik F. Hal ini dikarenakan variabel yang diuji lebih dari satu variabel independen. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran Komite Audit dan jumlah rapat Komite Audit berpengaruh signifikan positif terhadap *audit fees*. Variabel keahlian Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit fees*. Sedangkan Independensi Komite Audit, kepemilikan perusahaan asing, dan kepemilikan perusahaan BUMN tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci: *audit fees*, komite audit, tipe kepemilikan perusahaan, audit eksternal.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

“Nanakorobi yaoki. (Fall seven times and stand up eight)”

(Japanese Proverb)

“The greatness of a man is not in how much wealth he acquires, but in his integrity and his ability to affect those around him positively.”

(Bob Marley)

“Go follow your path. But, don’t forget your roots.”

(Kharisma Gati)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak, Ibu, Kakak-kakak tercinta , serta orang-orang terkasih
yang senantiasa memberi doa, semangat,
dan kasih sayang yang selalu menemani di setiap langkah hidupku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PENGARUH KOMITE AUDIT DAN TIPE KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PADA *AUDIT FEES*** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari banyak hambatan-hambatan yang ada, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak yang telah membantu terciptanya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt, selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas bimbingan, nasehat, pengarahan dan koreksi yang diberikan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Prof. Dr. H. Muhammad Syafrudin, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas dedikasinya untuk kemajuan fakultas tercinta.
4. Alm. Dr. H. Sugeng Pamudji, M.Si., Akt. dan Aditya Septiani S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Wali. Terimakasih atas bimbingan dan waktu yang telah diberikan selama perwaliannya.
5. Bapak/Ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan perkuliahan.
6. Bapak Pujono SH. MM, Ibu Dwi Sulistyowati, Kakak Dhiyas Widigjaya dan Raras Mahiswari atas doa, kasih sayang, perhatian, dukungan, motivasi, arahan, dan semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

7. Dayu's Management : Adila Ashari P, S Willy Rahadyan, Vanessa Praditasari, Destriana Wiryakurnia U, Pratiwi Nurul Aini, Ega Dastentya Oktavia, Idayu Rahmadewi, Rista Anggraini, Izzani Fauziah, dan Herdian Duantoro P. Terimakasih telah menjadi sahabat yang baik, yang selalu mendukung bagi penulis.
8. Teman-teman akuntansi 2011. Terimakasih telah menjadi bagian hidup penulis dengan tawa, tangis dan senyumnya.
9. Teman-teman satu bimbingan, Willy Rahadyan, Adila Ashari P, Agustina Dewi, Risha A, Bahana Takbir A, dan Ulian Febriansyah, yang telah menemani penulis dari awal hingga skripsi ini selesai.
10. Kawan-kawan Paduan Suara Economic Voice, Adhika Pradhana, Safrianisa Dewi, Prapanca R, Sherly V, Mas Ichi, serta adik-adik EV terutama angkatan 2012-2013. Terima kasih atas pengalaman berharga dan kebersamaan dalam berkarya di dunia tarik suara.
11. Teman-teman yang tergabung dalam PKDP x Dayus, Andika Nugroho S, Nofrizal Damai, Chandra Ayu, Arfianty Reka, Prapanca R, Maya Retha M, Rhety Ayu D, Rafika Ewid B, dan Lisa Melyana terima kasih atas arahan skripsi serta dukungan selama ini.
12. Kontrakan "Sapari Boys" Alexander K, Hermas A, Nanang S, Novia Bani N, serta teman-teman lain yang tergabung di kontrakan. Terima kasih telah mau untuk menjadi tempat persinggahan sementara demi melepas lelah dan penat.
13. Sahabat-sahabat penulis, Febriana Tri Kusumawati, S Willy Rahadyan, Herdian D P, Yohanes Ivan K, Laurentinus Ricky A, Rezky Farras K, Fafa Yushifa P, Herjaya Nugraha, Fahmi F, Benedectus Emanuel A, Julianto Tri W, Bagus Jati, Devi Kharisma, Wahyu Indah K, yang selalu mendukung dan memotivasi dari dekat maupun dari jauh.
14. Teman-teman KKN Tim II Desa Jragan, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Odie Faiz G, Sandhy P, Ardhiyanto S, Belgis Novel, Atika A, Muhammad Dani, dan Aisha Mentari atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.

15. Para senior yang selalu membantu dalam hal akademis dan moril, Seger H Wibowo, Mas Annas B.W, Mas Rhino, dan Khairul A Fiandri.
16. Bagian Tata Usaha. Terimakasih atas bantuannya dalam semua proses yang diperlukan.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi ini adalah hasil terbaik yang telah diberikan oleh penulis. Jika masih ada kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, guna perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membaca.

Semarang, 13 Agustus 2015
Penulis,

Kharisma Gati
NIM. 12030111140266

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Agensi.....	8
2.1.2 Corporate Governance	11
2.1.3 Komite Audit	13
2.1.3.1 Peran Komite Audit	14
2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Komite Audit	16
2.1.4 Tipe Kepemilikan Perusahaan	17
2.1.5 Audit Fees	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.2.1 Penelitian Terdahulu Mengenai Komite Audit pada Audit fees.....	22

2.2.2 Penelitian Terdahulu Mengenai Tipe kepemilikan perusahaan pada Audit fees.....	23
2.3 Kerangka Pemikiran	27
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	30
2.4.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Penetapan Fee Audit Eksternal	30
2.4.2 Pengaruh Intensitas Pertemuan Komite Audit terhadap Audit fees Eksternal	31
2.4.3 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Audit fees Eksternal.....	32
2.4.4 Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Audit fees Eksternal	32
2.4.5 Pengaruh Tipe kepemilikan perusahaan terhadap Audit fees Eksternal	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	35
3.1.1 Variabel Dependen	35
1. Audit Fees	35
3.1.2 Variabel Independen	35
3.1.2.1 Ukuran Komite Audit.....	36
3.1.2.2 Intensitas Pertemuan Komite Audit	36
3.1.2.3 Independensi Komite audit.....	36
3.1.2.4 Keahlian Komite Audit	37
3.1.2.5 Tipe Kepemilikan Perusahaan.....	37
3.2 Populasi dan Sampel.....	38
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.5 Metode Analisis Data	39
3.5.1 Analisis Deskriptif	39
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	40
3.5.2.1 Uji Normalitas	40
3.5.2.2 Uji Multikolonieritas	40
3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas	41

3.5.3 Uji Hipotesis	42
3.5.3.1 Uji koefisien Determinasi (R ²)	43
3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (F)	42
3.5.3.3 Uji Statistik t.....	42
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	45
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	45
4.2 Statistik Deskriptif	45
4.3 Statistik Deskriptif Penelitian yang Diukur Dengan Variabel Dummy.....	48
4.4 Analisis Data.....	49
4.4.1 Uji Asumsi Klasik.....	49
4.4.1.1 Uji Normalitas	49
4.4.1.2 Uji Multikolonieritas	52
4.4.1.3 Uji Heterokedastisitas	53
4.4.2 Analisis Regresi Berganda.....	57
4.4.3 Uji Hipotesis	58
4.4.3.1 Koefisien Determinasi (R ²)	58
4.4.3.2 Uji F.....	59
4.4.3.3 Uji T	60
4.5 Pembahasan	62
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Keterbatasan Penelitian	69
5.3 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1 Perolehan Sampel Perusahaan	45
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	46
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif yang diukur dengan variabel dummy	48
Tabel 4.4 Uji Kolmogorov-Smirnov	52
Tabel 4.5 Uji Multikolonieritas.....	53
Tabel 4.6 Uji Glesjer.....	55
Tabel 4.7 Model Regresi Berganda.....	57
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi Model Regresi.....	58
Tabel 4.9 Uji F Model Regresi.....	59
Tabel 4.10 Tabel Uji T	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	50
Gambar 4.2 Grafik <i>Normal Probability Plot</i>	51
Gambar 4.3 <i>Scatterplot</i>	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar Sampel Penelitian	73
Lampiran B Hasil Statistik Deskriptif.....	77
Lampiran C Hasil Uji Normalitas	79
Lampiran D Hasil Uji Multikolonieritas	81
Lampiran E Hasil Uji Heterokedastisitas	82
Lampiran F Hasil Uji Koefisien Determinasi	83
Lampiran G Hasil Uji Statistik F	84
Lampiran H Hasil Uji Statistik T	85

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Perusahaan memerlukan laporan keuangan sebagai media informasi untuk berkomunikasi dengan investor serta pengguna-pengguna eksternal lainnya dalam hal kinerja perusahaan. Dengan laporan keuangan, pemangku kepentingan dari eksternal perusahaan dapat mengetahui kinerja perusahaan dan dapat digunakan sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009), Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Karena terdapat dua belah pihak yang terlibat dalam hal ini yaitu pihak pemangku kepentingan dari eksternal dan perusahaan, teori keagenan menjadi dasar untuk menjelaskan praktik pengelolaan perusahaan. Dimana para direksi ditunjuk dan diawasi oleh pemilik perusahaan yang dalam hal ini para stakeholder. Setelah itu, Direksi akan merumuskan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan menunjuk manajer dan staf untuk melaksanakan strategi tersebut. Karena terdapat pemisahan kepemilikan dan

kontrol dalam sebuah perusahaan, telah melahirkan konsep tata kelola perusahaan atau yang sering disebut Corporate Governance yang mencakup semua tindakan, kebijakan dan prosedur yang menyelaraskan manajer kepentingan dan kepentingan pemegang saham dan semua pemangku kepentingan lain dari perusahaan (Rustam *et.al.*, 2013).

Audit, sebagai salah satu ukuran corporate governance, telah mendapat perhatian meningkat melalui berbagai skandal perusahaan seperti Enron atau WorldCom. (Rustam *et.al.*, 2013). Dalam kasus Enron, para komite audit tidak bekerja secara independen dan malah menerima sogokan yang berbentuk donasi dari Enron sendiri. Contoh ini menunjukkan bahwa orang-orang dalam posisi yang bertanggung jawab, yang seharusnya bertugas untuk mendeteksi kegiatan yang tidak etis, malah menjadi tidak independen (Solomon, 2007) yang berakibat runtuhnya perusahaan-perusahaan besar dan berdampak ke perusahaan-perusahaan lainnya. Setelah ditemukannya skandal-skandal tersebut, maka pada tahun 2002, diterbitkan undang-undang SOX (*Sarbanes-Oxley Act*) yang berfungsi untuk mengatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan *governance*; yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen.

SOX juga mengatur tentang pentingnya independensi dan proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal agar menghasilkan laporan keuangan yang *Relevant* dan *Reliable*. Eksternal auditor bertugas untuk mengawasi jalannya

kinerja keuangan dan memeriksa apakah ada kesalahan maupun penyesatan informasi yang dilakukan oleh perusahaan melalui media laporan keuangan guna untuk melindungi para investor dari informasi keuangan yang tidak lengkap, tidak akurat, dan menyesatkan. Eksternal auditor juga diperlukan untuk mengungkapkan pendapat atas penilaian manajemen terhadap efektivitas desain dan operasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan serta pendapat atas efektivitas pengendalian internal itu sendiri.

Karena menggunakan jasa eksternal auditor, maka perusahaan mengeluarkan biaya untuk mempekerjakan auditor eksternal ini yang lebih dikenal dengan *audit fees*. Menurut Iskak (1999) *audit fees* sebagai honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan *auditee* atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Di Indonesia, diterbitkan panduan untuk menentukan Fee Audit melalui Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008. Dimana surat keputusan tersebut dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Akuntan Publik Indonesia dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa professional yang diberikan mereka.

Komite Audit, sebagai salah satu bagian dari corporate governance. Juga mempengaruhi besaran *audit fees* dalam perusahaan. Dalam penelitian Yatim *et.al* (2006) yang menguji pengaruh antara *fee* audit eksternal, dewan komisaris serta karakteristik komite audit. Dengan sampel 736 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2003, ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *fee* audit dan independensi dewan komisaris, komite audit dan

frekuensi pertemuan komite audit. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustam *et.al.*,(2013) yang meneliti besarnya *audit fees* yang dibayarkan ke auditor eksternal yang terdapat di Pakistan pada tahun 2007-2013. Menggunakan variable komite audit dan kompensasi insentif, menemukan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya *audit fees* yang dibayarkan ke auditor eksternal. Namun, penelitian yang dilakukan Risqiyasih (2010) yang merupakan replikasi dari penelitian Yatim pada tahun 2006. Dengan menggunakan variabel *corporate governance* dan komite audit terhadap fee audit pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2006-2008, disebutkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi besarnya *audit fees* yang ada di Indonesia.

Selain komite audit, ternyata tipe kepemilikan perusahaan juga berpengaruh terhadap besar kecilnya fee audit yang diberikan kepada auditor eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Gosh (2010) menggunakan variabel tipe kepemilikan perusahaan dan manajemen laba terhadap fee audit yang terdapat di perusahaan di India, menemukan bahwa *audit fees* yang dibayarkan oleh perusahaan asing lebih tinggi daripada yang dibayarkan oleh perusahaan yang dimiliki oleh Negara. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2013) yang menggunakan variabel Tipe Kepemilikan Perusahaan dan manajemen laba terhadap pemilihan auditor dan *audit fees*, hasilnya menunjukkan bahwa tipe kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh asing mempengaruhi pemilihan auditor. Tetapi, tipe kepemilikan perusahaan tidak mempengaruhi *Audit fees*. Manajemen laba tidak mempengaruhi auditor pilihan dan pemeriksaan biaya. Pemilihan Auditor juga mempengaruhi *audit fees*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari komite audit serta tipe kepemilikan perusahaan terhadap *audit fees*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Rustam *et.al.*,(2013) dengan beberapa penyesuaian yang terdapat di Indonesia. antara lain, penelitian ini tidak menggunakan variabel kompensasi insentif seperti yang digunakan oleh Rustam *et.al.*,(2013) karena data kompensasi insentif tidak terdapat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel tipe kepemilikan perusahaan seperti yang dilakukan oleh Agustina (2013) karena terdapat inkonsistensi hasil yang muncul dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH KOMITE AUDIT DAN TIPE KEPEMILIKAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMILIHAN AUDITOR DAN AUDIT FEES.”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, Penelitian ini bermaksud untuk menguji hubungan antara Komite audit dan Tipe kepemilikan perusahaan dengan *audit fees*. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit fees* eksternal?
2. Bagaimana pengaruh intensitas pertemuan komite audit terhadap *audit fees* eksternal?
3. Bagaimana pengaruh independensi komite audit terhadap *audit fees* eksternal?

4. Bagaimana pengaruh keahlian komite audit terhadap *audit fees* eksternal?
5. Apakah tipe kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap *audit fees* eksternal?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap *audit fees* yang diberikan oleh perusahaan terhadap besarnya *audit fees* yang diberikan kepada auditor eksternal, serta mengetahui apakah terdapat pengaruh tipe kepemilikan perusahaan terhadap *audit fees* yang diberikan kepada auditor eksternal pada perusahaan go public yang terdapat di Indonesia.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan informasi dan kontribusi berupa tulisan bagi perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi terutama penelitian tentang komite audit, tipe kepemilikan perusahaan serta *audit fees*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini untuk meninjau perkembangan peran dan tanggung jawab komite audit dalam mekanisme *Corporate governance* terhadap *audit fees* yang terdapat di Indonesia. Penelitian ini juga dapat dijadikan salah satu sumber referensi untuk penelitian mendatang. Serta penelitian ini digunakan untuk mengetahui perkembangan akuntansi dari tahun ke tahun mengenai pengaruh komite audit dan tipe kepemilikan perusahaan terhadap *audit fees*.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan teori yang mendasari diadakannya penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan penjelasan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bagian metode penelitian menjelaskan tentang variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, teknik analisis, dan pengujian hipotesis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi obyek penelitian yang terdiri dari gambaran umum sampel dan hasil olah data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup

Merupakan simpulan penelitian, keterbatasan serta saran bagi penelitian mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling mendefinisikan manajer perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Pemegang saham sebagai prinsipal mendelegasikan pembuatan keputusan sehari-hari dalam perusahaan kepada direktur selaku agen.

Sedangkan Don Delves and Brian Patrick (2010) mendefinisikan Teori Agensi adalah di mana satu orang atau lebih (*principal*) terlibat dengan orang lain (*agent*) untuk melakukan tugas atau jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Contoh yang paling dikenal pada hubungan agensi adalah majikan dan karyawan. Contoh lain termasuk negara (*principal*) dan duta (*agent*); konstituen (*principal*) dan wakil terpilih (*agent*); Organisasi (*principal*) dan pelobi (*agent*); atau pemegang saham (*principal*) dan CEO (*agent*).

Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan Eisenhardt (dalam Darmawati, dkk. 2004).

Pertama, adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua, adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda yang dikarenakan adanya perbedaan preferensi terhadap risiko.

Dalam teori keagenan, masalah utamanya adalah perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Para pemegang saham selaku prinsipal mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kekayaan mereka sedangkan para manajer cenderung untuk mencapai tujuan pribadinya, seperti contoh mendapatkan bonus yang lebih tinggi (Agustina, 2013). Manajer seringkali cenderung bertindak untuk mengejar kepentingannya sendiri dan sudah tidak berdasar atas maksimasi nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan (Jensen dan Meckling, 1976). Masalah yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan dalam hal pengambilan keputusan pendanaan antara lain karena para pemegang saham hanya peduli terhadap risiko sistematis dari saham perusahaan, karena mereka melakukan investasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Sebaliknya para manajer lebih peduli terhadap risiko perusahaan secara keseluruhan.

Masalah keagenan tersebut karena terjadinya *assymetric information* antara pemilik dan manajer. Di mana terdapat informasi yang dimiliki oleh salah satu pihak tetapi tidak dimiliki oleh pihak lain. *Asymmetric information* terdiri

dari dua tipe. Pertama, *adverse selection*, yaitu pihak yang merasa memiliki informasi lebih sedikit dibandingkan pihak lain tidak akan mau melakukan perjanjian, dia akan membatasi dengan kondisi yang sangat ketat dan biaya yang sangat tinggi. Tipe yang kedua adalah *moral hazard*. *Moral hazard* ini terjadi kapanpun manajer melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik untuk keuntungan pribadinya dan menurunkan kesejahteraan pemilik.

Pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya pengawasan ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency cost*. Aktivitas pengawasan dapat berupa kontrak perjanjian yang di buat antara prinsipal dan agen. Sedangkan *agency cost* itu sendiri adalah ongkos atau resiko yang terjadi ketika seseorang (*principal*) membayar seseorang (*agent*) untuk menjalankan sebuah tugas, padahal kepentingan *agent* bertentangan atau tidak selaras dengan kepentingan *principal*.

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan agent. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan stakeholders karena adanya perbedaan kepentingan yang besar antara mereka.

Biaya keagenan ini merupakan bentuk paling mendasar sebagai indikator terjadinya masalah keagenan, baik kaitannya dengan (1) biaya pemantuan

(*monitoring cost*), (2) biaya perikatan (*bounding cost*), (3) kerugian residual (*residual cost*) sebagai pengurang kekayaan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Karena dalam hal ini *audit fees* merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka menggunakan jasa auditor eksternal, *audit fees* itu sendiri termasuk dalam kategori *monitoring cost* serta *bounding cost*. Maka dalam hal ini, biaya keagenan sendiri merupakan *audit fees*.

2.1.2 Corporate governance

Adanya *assymetric information* dalam perusahaan yang melibatkan *principal* dan *agen* telah menimbulkan permintaan akan adanya suatu kontrol yang dibutuhkan untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya perusahaan baik secara internal maupun eksternal, sehingga terciptalah *Corporate governance*. Menurut Soltani (dalam Rustam *et.al.*, 2013) menyatakan bahwa *corporate governance* yang terkait dengan fungsi pengawasan dewan direksi dan komite audit. *Corporate governance* menjamin pelaporan keuangan yang dapat diandalkan dari suatu perusahaan oleh manajemen. Berbagai upaya *corporate governance* yang berkaitan dengan audit meminimalkan kemungkinan pengungkapan *restatement* keuangan untuk melindungi perusahaan terhadap efek negatif.

Berdasarkan definisi oleh *Forum for Corporate governance in Indonesia (FCGI)* *corporate governance* didefinisikan sebagai “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola), pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) merumuskan tujuan dari *corporate governance* adalah untuk mengoptimalkan nilai tambah perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan 18 pemangku kepentingan lainnya. KNKG menjelaskan terdapat lima asas dalam *good corporate governance*, yaitu:

1. **Transparansi (*Transparency*)** Transparansi digunakan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)** Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. **Responsibilitas (*Responsibility*)** Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan

usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*) Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.3 Komite Audit

Salah satu pilar dari *Corporate governance* adalah komite audit. Komite audit sendiri merupakan suatu badan independen yang terdiri dari dewan komisaris tetapi tidak terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Karena tidak terlibat dalam kegiatan operasi perusahaan, maka komite audit seharusnya tidak terlibat oleh masalah keagenan karena hubungan antara prinsipal dan agen tidak ada dalam komite audit.

Menurut (Davies, 1995) menyatakan bahwa :

“Audit komite adalah sebuah komite yang terdiri dari anggota non-eksekutif independen dari suatu perusahaan yang telah ditetapkan, fungsinya antara lain: pengawasan pelaporan keuangan dan proses audit; "badan" berarti dewan entitas direksi, wali atau gubernur, atau badan lain yang setara atau orang.”

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), pengertian Komite Audit adalah sebagai berikut:

“Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.”

Keberadaan komite audit bagi perusahaan publik sendiri diatur melalui Peraturan Nomor IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, lalu disempurnakan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-643/BL/2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Sedangkan untuk BUMN sendiri melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2.1.3.1 Peran Komite Audit

Menurut (Rustam *et.al.*, 2013) komite audit memberikan pengawasan aktif dalam proses pelaporan keuangan dan juga memantau hubungan antara manajemen perusahaan dan auditor eksternal. Oleh karena itu, komite audit memainkan peran penting dalam penentuan fee audit. Komite Audit bertanggung jawab untuk menyewa, memecat, dan menentukan bayaran auditor eksternal. Komite audit secara berkala menyajikan laporan kepada dewan direksi. Komite

Audit tidak hanya menangani berbagai permasalahan dengan auditor, tetapi juga menyampaikan dan membicarakan hal tersebut dengan manajer, auditor eksternal, dan departemen audit. Tanggung jawab utama dari komite audit adalah untuk memberikan pengawasan pada keandalan pelaporan keuangan. Komite audit meninjau kualitas laporan keuangan dengan mempelajari pelaksanaan, dan perubahan, prinsip akuntansi.

Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-643/BL/2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Komite Audit

Forum for Corporate governance in Indonesia (FCGI) mengemukakan bahwa Komite Audit mempunyai tujuan membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggungjawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 menjelaskan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris atau dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal.

Sedangkan manfaat Komite Audit dikemukakan oleh Hiro Tugiman (1995), adalah:

- a. Dewan Komisaris dan Direksi akan banyak terbantu dalam pengelolaan perusahaan.
- b. Bagi eksternal auditor adalah keberadaan Komite Audit sangat diperlukan sebagai forum atau media komunikasi dengan perusahaan, sehingga diharapkan semua aktivitas dan kegiatan eksternal auditor dalam hal ini akan mengadakan pemeriksaan, disamping secara langsung kepada objek pemeriksaan juga dibantu dengan mengadakan konsultasi dengan Komite Audit.

Dari Penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan komite audit dibentuk agar memperkuat pengawasan pada emiten dikarenakan keterbatasan pengawasan dari dewan direksi.

2.1.4 Tipe Kepemilikan Perusahaan

Penelitian Ghosh (2010) yang mengambil objek penelitian perusahaan manufaktur di India, meneliti tentang hubungan antara tipe kepemilikan perusahaan dan manajemen laba terhadap pemilihan auditor dan *audit fees*. Tipe kepemilikan perusahaan dibagi menjadi tiga tipe yaitu: BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Mengembangkan penelitian Ghosh (2010), Agustina (2013) membagi tipe kepemilikan perusahaan yang ada di Indonesia menjadi tiga tipe, yaitu BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing.

BUMN didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu sebagai :

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka) adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perusahaan swasta / Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Modal diperoleh dari warga negara Indonesia dan perusahaan didirikan di Indonesia.

BUMS biasanya berbentuk perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, atau perseroan terbatas. BUMS yang berbentuk perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sedangkan perusahaan asing atau Badan Usaha Swasta Asing adalah badan usaha swasta yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta asing. Modal diperoleh dari luar negeri, tetapi perusahaan didirikan di Indonesia. Keberadaan Badan Usaha. Perusahaan Asing sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Menurut Ismail Suny ada 3 (tiga) macam kerjasama antara modal asing dengan modal nasional berdasarkan undang-undang penanaman modal asing No. 1 Tahun 1967 yaitu:

1. *Joint Venture*

Joint venture merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata mata berdasarkan suatu perjanjian belaka (contractual). Kerjasama ini juga biasa disebut dengan “*Contract of Cooperation*” yang tidak membentuk suatu badan hukum Indonesia.

2. *Joint Enterprise*

Joint enterprise merupakan suatu kerjasama antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri dengan membentuk suatu perusahaan atau badan hukum baru. Joint Enterprise merupakan suatu perusahaan terbatas, yang modalnya terdiri dari modal dalam nilai rupiah maupun dengan modal yang dinyatakan dalam valuta asing

3. Kontrak Karya

Pengertian kontrak karya (*contract of work*) sebagai suatu bentuk usaha kerjasama antara penanaman modal asing dengan modal nasional terjadi

apabilapenanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. Bentuk kerjasama kontrak karya ini hanya terdapat dalam perjanjian kerja sama antara badan hukum milik negara (BUMN).

4. Kontrak production sharing

Kontrak production sharing yaitu perjanjian kerja sama kredit antara penanam modal asing dengan pihak Indonesia yang memberikan kewajiban kepada pihak Indonesia untuk mengekspor hasilnya kepada negara pemberi kredit.

2.1.5 *Audit fees*

De Angelo (dalam Agustina, 2013) menyatakan bahwa *audit fees* merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, risiko audit yang dihadapi auditor dari klien, serta nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit. Simunic (1996) menyatakan bahwa *audit fees* ditentukan oleh besar kecilnya perusahaan yang diaudit (client size), risiko audit (atas dasar current ratio, quick ratio, D/E, litigation risk) , dan kompleksitas audit (subsidiaries, foreign listed).

Soltani (2007) mendefinisikan *audit fees* sebagai biaya yang berkaitan dengan auditor melakukan audit untuk menyatakan pendapat atas apakah laporan keuangan klien secara keseluruhan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

Auditor eksternal, menjadi bagian penting dari mekanisme *corporate governance*, merupakan alat penting dalam memberikan jaminan untuk melindungi hak-hak investor. Auditor eksternal menjamin bahwa semua pemegang saham diperlakukan sama dan bahwa laporan keuangan sesuai dengan kewajiban kontrak. Auditor eksternal meningkatkan kepercayaan investor, menilai posisi tujuan perusahaan dan meningkatkan peluang dana penggalangan (Rustam *et.al.*, 2013). Di Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee* Audit. Dalam bagian Lampiran 1 dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku (Risqiyasih, 2010).

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh komite audit dan tipe kepemilikan perusahaan pada *audit fees*. Sebenarnya, penelitian mengenai *audit fees* sudah cukup banyak dilakukan. Tetapi penelitian sebelumnya belum pernah menguji hubungan antara komite audit dan tipe kepemilikan perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi *audit fees*. Berikut ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu mengenai komite audit, tipe kepemilikan perusahaan, dan *audit fees*.

2.2.1 Penelitian terdahulu mengenai komite audit pada *Audit fees*

Yatim *et.al* (2006) yang berjudul “*Governance Structures, Ethnicity and Audit fees of Malaysian Listed Firms*” yang menguji pengaruh antara *fee* audit eksternal, dewan komisaris serta karakteristik komite audit. Dengan sampel 736 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2003, ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *fee* audit dan independensi dewan komisaris, komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit.

Risqiyasih (2010) menggunakan variabel *corporate governance* dan komite audit terhadap *fee* audit pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2006-2008, disebutkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi besarnya *audit fees* yang ada di Indonesia.

Rustam *et.al.*, (2013) yang mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Yatim *et.al* (2006) meneliti besarnya *audit fees* yang dibayarkan ke auditor eksternal yang terdapat di Pakistan pada tahun 2007-2013. Menggunakan variabel komite audit dan kompensasi insentif, menemukan bahwa komite audit

berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya *audit fees* yang dibayarkan ke auditor eksternal. Sedangkan variabel kompensasi insentif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan *audit fees*

2.2.2 Penelitian terdahulu mengenai tipe kepemilikan perusahaan pada *Audit fees*

Penelitian Khan dan Nava Subramaniam (2009) Penelitian yang mengambil objek penelitian di Australia ini menguji apakah perusahaan keluarga berpengaruh terhadap pemilihan auditor dan *audit fees*. Penelitian ini membagi tipe kepemilikan perusahaan menjadi dua tipe yaitu perusahaan keluarga dan bukan perusahaan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan keluarga kemungkinan besar menunjuk KAP yang termasuk dalam *big four* untuk menjamin kualitas audit dan mengurangi *agency cost* yang lebih tinggi. Perusahaan keluarga membayar lebih tinggi *audit fees* daripada perusahaan non-keluarga.

Penelitian Ghosh (2010) mengambil objek penelitian perusahaan manufaktur di India yang terdaftar pada Bursa Efek India tahun 2005. Penelitian ini mengungkapkan faktor yang mempengaruhi pemilihan auditor dan *audit fees* adalah tipe kepemilikan perusahaan dan manajemen laba yang diterapkan perusahaan. Tipe kepemilikan perusahaan dibagi menjadi tiga tipe, yaitu BUMN, kepemilikan asing, dan kepemilikan swasta India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor internasional lebih dipilih baik oleh perusahaan asing maupun BUMN. *audit fees* yang dibayarkan oleh perusahaan asing lebih tinggi daripada yang dibayarkan oleh BUMN.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2013) menggunakan variabel Tipe Kepemilikan Perusahaan dan manajemen laba terhadap pemilihan auditor dan *audit fees*, hasilnya menunjukkan bahwa tipe kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh asing mempengaruhi pemilihan auditor. Tetapi, tipe kepemilikan perusahaan tidak mempengaruhi *audit fees*. Manajemen laba tidak mempengaruhi auditor pilihan dan pemeriksaan biaya. Pemilihan Auditor juga mempengaruhi *audit fees*.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Yatim <i>et.al.</i> (2006)	Variabel Dependen : <i>Audit fees</i> Variabel Independen : Board Independence, Board Size, Risk Management Committee, Board Meeting Positions of the Board Chair and the CEO Audit, Committee Independence, Audit Committee Expertise, Audit Committee Meeting, Audit Committee Size, Bumi Owned	Uji Regresi Berganda	Independensi dewan komisaris, komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit berhubungan dengan kenaikan <i>fee</i> audit.

Ghosh, Saibal (2010)	Variabel Dependen : Pemilihan Auditor, <i>Audit fees</i> Variabel Independen : Tipe Kepemilikan Perusahaan, Manajemen Laba	<i>OLS Regression</i>	1. KAP internasional kemungkinan lebih dipilih baik oleh perusahaan asing maupun BUMN. <i>Audit fees</i> yang dibayarkan oleh perusahaan asing lebih tinggi daripada yang dibayarkan oleh BUMN. Perusahaan yang mempunyai akrual diskresioner yang tinggi kemungkinan kecil diaudit oleh auditor
Risqiyasih (2010)	Variabel Dependen : <i>Audit fees</i> Eksternal Variabel Independen : Dewan Komisaris, Komite Audit	Regresi Berganda	Ukuran dewan komisaris, intensitas rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan intensitas rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit
Rustam <i>et.al.</i> ,(2013)	Variabel Dependen : Corporate <i>Audit fees</i> Variabel Independen : <i>Audit committees</i> , <i>Compensation incentives</i>	<i>OLS Regression</i>	Komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Audit fees</i> . variabel kompensasi insentif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Audit fees</i>

Agustina (2012)	Variabel Dependen: <i>Audit fees</i> , Pemilihan Auditor Variabel Independen : Tipe kepemilikan perusahaan, manajemen laba	Regresi Logistik, Regresi berganda	Tipe kepemilikan perusahaan milik asing berpengaruh terhadap pemilihan auditor. Tipe kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Audit fees</i> . Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor dan besarnya <i>Audit fees</i> yang dibayarkan oleh perusahaan. pemilihan auditor berpengaruh pada <i>Audit fees</i> .
-----------------	--	---	---

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini akan menguji pengaruh Komite audit dan Tipe kepemilikan perusahaan terhadap *audit fees*. Berdasarkan telaah pustaka dari penelitian terdahulu, variabel independen yang digunakan adalah Komite audit mencakup ukuran komite audit, independensi komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan keahlian komite audit serta menggunakan variabel independen tipe kepemilikan perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah *audit fees*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yatim *et.al.*,(2006), berpendapat bahwa komite audit yang lebih besar cenderung meningkatnya pengendalian internal dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik, sehingga biaya audit eksternal yang lebih rendah.hal ini dikarenakan beban audit yang ditanggung oleh eksternal auditor menjadi berkurang yang berujung pada pengurangan biaya audit

Semakin banyaknya jumlah pertemuan yang dilakukan komite audit, maka akan berpengaruh kepada semakin tingginya jumlah biaya audit yang dikeluarkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Stewart dan Munro (2007) menemukan terdapat hubungan antara aktivitas komite audit dan biaya di perusahaan Australia. Alasannya karena bertambahnya waktu ekstra yang dihabiskan oleh auditor dalam mempersiapkan dan menghadiri pertemuan dengan anggota Komite Audit dapat meningkatkan jam kerja auditor dan berakibat kepada meningkatnya biaya yang dibayarkan kepada auditor.

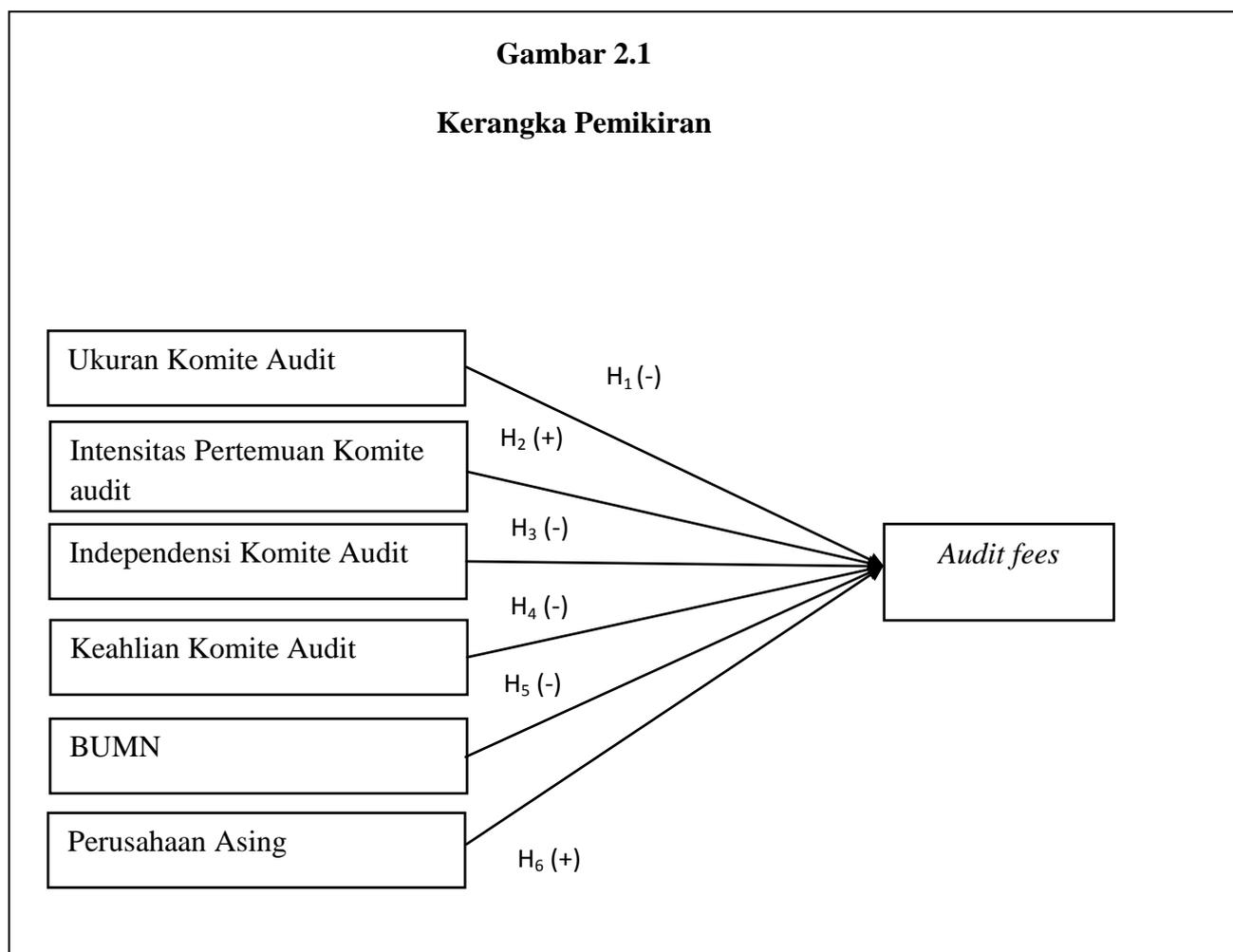
Komite audit dianjurkan dalam salah satu anggotanya terdapat anggota independen seperti yang disarankan *The Blue Ribbon Committee (1999)*. Sesuai dengan teori agensi, bahwa komite audit yang independen dapat membantu pemilik perusahaan untuk memonitoring perusahaan dengan lebih baik karena tidak terdapat kepentingan di dalamnya. Komite audit yang independen akan lebih baik dalam hal perlindungan reliabilitas proses akuntansi dan memajukan objektivitas dari komite audit (Risqiyasih, 2010). Hal ini akan memperkuat pengendalian internal dan mengarah kepada berkurangnya risiko pengendalian dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, pengujian substantif dapat dikurangi sehingga fee audit akan berkurang pula.

Salah satu tanggung jawab dari komite audit untuk mengawasi akuntansi perusahaan dan kontrol keuangan serta pelaporannya. Maka dari itu, pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan mutlak diketahui oleh anggota komite audit. *The Blue Ribbon Committee (1999)* menetapkan bahwa Semua anggota Komite harus familier dengan keuangan dan akuntansi, serta setidaknya 1(satu) anggota Komite harus memiliki akuntansi atau keahlian manajemen keuangan. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit yang memiliki

pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan, maka komite audit akan lebih mampu untuk mendeteksi risiko-risiko keuangan. Komite audit yang memiliki keahlian juga mendeteksi masalah prosedur audit dan risiko dalam cara yang lebih baik sehingga mengurangi *audit fees*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ghosh (2010), Perusahaan yang dimiliki oleh Negara atau BUMN cenderung mempunyai unsur-unsur politik di dalamnya, Wang *et.al.*,(2008) dalam Agustina (2013) berpendapat bahwa BUMN lebih mungkin terikat dengan auditor berkualitas rendah karena mereka dapat meningkatkan modal melalui koneksi ini tanpa harus mengurangi asimetri informasi dengan laporan keuangan yang lebih kredibel. Karena memilih auditor yang berkualitas rendah, maka biaya audit yang dikeluarkanpun akan lebih rendah.

Perusahaan yang dimiliki asing cenderung memiliki kompleksitas perusahaan yang lebih tinggi daripada perusahaan dalam negeri. Karena lebih tinggi tingkat kerumitan perusahaan, maka beban yang ditanggung oleh auditor eksternal lebih besar dan menambah biaya audit. Penelitian Ghosh (2010) menemukan bahwa *audit fees* yang dibayarkan oleh perusahaan asing lebih tinggi daripada yang dibayarkan oleh BUMN.

Gambar 2.1**Kerangka Pemikiran****2.4 Pengembangan Hipotesis****2.4.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Penetapan Fee Audit Eksternal**

Komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris guna membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit juga bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-643/BL/2012 Tentang Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, paling

kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan *The Blue Ribbon Company* (1999) yang merekomendasikan sama. Braoitta (2000) dalam Yatim *et.al.*, (2006) juga menyatakan bahwa rekomendasi jumlah anggota komite audit konsisten dengan keinginan untuk meningkatkan status organisasi komite audit. Dengan lebih banyaknya anggota komite audit, maka diharapkan ada pengendalian internal yang lebih besar sehingga berujung pada meningkatnya kualitas laporan keuangan. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan, maka *audit fees* yang dibayarkan kepada audit eksternal akan berkurang karena beban audit eksternal juga berkurang.

H1 = Ukuran komite audit akan berpengaruh negatif terhadap *Audit fees* eksternal.

2.4.2 Pengaruh Intensitas Pertemuan Komite Audit terhadap *Audit fees* Eksternal

Intensitas pertemuan komite audit adalah jumlah rapat yang diadakan oleh komite audit dalam setahun guna membahas masalah-masalah yang terdapat di perusahaan. *The Blue Ribbon Company* (1999) merekomendasikan jumlah rapat komite audit sekurang-kurangnya 4(empat) kali dalam setahun atau lebih. Stewart dan Munro (2007) menemukan bahwa ada hubungan positif antara jumlah pertemuan komite audit dan *audit fees*. Hal ini disebabkan karena jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit akan menambah jam kerja dari audit eksternal untuk menghadiri rapat tersebut, penambahan jam kerja tersebut akan berakibat kepada penambahan *audit fees* yang dibayarkan kepada auditor eksternal.

H2 = Intensitas Pertemuan komite audit akan berpengaruh positif terhadap *Audit fees* eksternal.

2.4.3 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap *Audit fees* Eksternal

The Blue Ribbon Committee (1999) merekomendasikan bahwa komite audit yang lebih independen, memiliki anggota lebih banyak, dan sering mengadakan rapat diharapkan akan meningkatkan pengawasan komite audit terhadap proses pelaporan keuangan. Abbot *et al.* (2001) dalam Risqiyasih (2010) menyebut bahwa komite audit yang independen dan aktif menuntut kualitas audit yang lebih tinggi berkaitan dengan perhatian yang besar terhadap kerugian moneter maupun hilangnya nama baik akibat kesalahan dalam pelaporan keuangan. Komite audit yang independen akan lebih baik dalam hal perlindungan reliabilitas proses akuntansi dan memajukan objektivitas dari komite audit (Wibowo, 2013). Hal ini akan memperkuat pengendalian internal dan mengarah kepada berkurangnya risiko pengendalian. Oleh karena itu pengujian substantif dapat dikurangi sehingga diharapkan dapat memperkecil fee audit.

H3 = Independensi Komite Audit akan berpengaruh negatif terhadap *Audit fees* eksternal.

2.4.4 Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap *Audit fees* Eksternal

Keefektifan kinerja komite audit akan bertambah jika terdapat anggota yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang keuangan dan akuntansi. *The Blue Ribbon Committee (1999)* menetapkan bahwa Semua anggota Komite harus familier dengan keuangan dan akuntansi, serta setidaknya 1(satu) anggota

Komite harus memiliki akuntansi atau keahlian manajemen keuangan. Hal ini juga didukung di Indonesia melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-643/BL/2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menyatakan Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Dhaliwal *et.al.*, (dalam Rustam *et.al.*, 2013) menunjukkan bahwa anggota komite audit dengan keahlian keuangan membatasi manipulasi laba. Komite audit yang memiliki keahlian juga mendeteksi masalah prosedur audit dan risiko dalam cara yang lebih baik sehingga mengurangi *audit fees*.

H4 = Keahlian Komite Audit akan berpengaruh negatif terhadap *Audit fees* eksternal.

2.4.5 Pengaruh Tipe kepemilikan perusahaan terhadap *Audit fees* Eksternal

Dalam penelitian Ghosh (2010) mengatakan dengan adanya tujuan-tujuan politik dalam perusahaan BUMN. Ghosh (2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa biaya audit yang dibayarkan oleh perusahaan BUMN lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya audit yang dibayarkan oleh perusahaan swasta

H5 = Perusahaan BUMN berhubungan negatif terhadap *Audit fees* eksternal.

Perusahaan yang dimiliki oleh asing cenderung memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar. Karena berukuran besar, maka akan meningkatkan kompleksitas bisnis karena perbedaan kelembagaan (seperti konsentrasi kepemilikan, kerangka peraturan) antar negara menyebabkan variasi dalam tingkat risiko yang dihadapi auditor (Rustam *et.al.*, 2013). Karena risiko yang dihadapi

auditor meningkat, maka akan berakibat pada meningkatnya *audit fees*. Selain itu, perusahaan luar negeri cenderung memilih KAP yang lebih besar seperti Big 4 agar menjaga kualitas laporan keuangannya tetap baik dan menjaga kepercayaan investor. Karena memilih KAP besar seperti Big 4 yang notabene menetapkan harga biaya audit lebih mahal daripada dengan KAP yang non-Big 4, maka akan berpengaruh kepada biaya audit yang dikeluarkan perusahaan.

H6 = Perusahaan Asing berhubungan positif terhadap *Audit fees* eksternal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Nilai dari Variabel dependen ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian kali ini, variabel dependen yang digunakan adalah *audit fees*. Variabel *audit fees* diukur menggunakan nilai logaritma natural dari biaya pemeriksaan total yang dibayarkan oleh perusahaan. Logaritma natural digunakan untuk memperkecil perbedaan angka yang terlalu jauh dari data yang didapatkan. Karena pengungkapan *audit fees* di Indonesia masih bersifat sukarela (*Voluntary disclosure*) (Risqiasih,2010), maka Data dari *audit fees* akan diambil dari laporan tahunan perusahaan. Selanjutnya variabel ini ditandai dengan LNFEED.

$$\text{LNFEED} = \text{Audit fees}$$

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang berdiri sendiri. Variabel independen bersifat mempengaruhi atau menjelaskan variabel lain. Variabel independen yang terdapat di penelitian ini ada lima, yaitu:

3.1.2.1 Ukuran Komite Audit

The Blue Ribbon Company (1999) merekomendasikan bahwa sekurang-kurangnya terdapat tiga orang yang menjadi komite audit. Semakin banyaknya anggota komite audit, diasumsikan bahwa semakin ketat pengawasan yang dilakukan sehingga meningkatkan kualitas laporan tahunan yang berujung pada menurunnya *audit fees*. Ukuran komite audit diukur melalui jumlah anggota komite audit yang tercantum dalam laporan tahunan. Selanjutnya, ukuran komite audit disimbolkan dengan ACSIZE

ACSIZE = Jumlah Komite Audit

3.1.2.2 Intensitas Pertemuan Komite Audit

The Blue Ribbon Company (1999) merekomendasikan komite audit setidaknya melaksanakan pertemuan sebanyak 4(empat) kali dalam setahun atau lebih sesuai dengan keadaan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Variabel intensitas pertemuan komite audit diukur dari jumlah pertemuan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya, variabel intensitas pertemuan komite audit disimbolkan dengan ACMEET

ACMEET = Jumlah pertemuan anggota komite audit dalam satu tahun

3.1.2.3 Independensi Komite audit

Independensi Komite Audit merupakan keadaan dimana para anggota komite audit harus diakui sebagai pihak independen. Independensi dari komite audit ini diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota komite audit yang independen terhadap jumlah seluruh anggota komite audit (Pamudji et al., 2009). Selanjutnya Independensi komite audit disimbolkan dengan ACINDP

$$ACINDP = \frac{\text{Jumlah Anggota Komite Audit Independen}}{\text{Jumlah Anggota Komite Audit}}$$

3.1.2.4 Keahlian Komite Audit

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-643/BL/2012 menyebutkan bahwa komite audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Keahlian di bidang keuangan sama pentingnya bagi komite audit karena fungsi utama dari komite tersebut adalah mengawasi proses pelaporan keuangan sebuah perusahaan (Rahman & Ali, 2006) dalam (Pamudji et al., 2009). Keahlian Komite Audit diukur melalui indikator persentase dari jumlah anggota komite audit yang merupakan mempunyai keahlian akuntansi dan/atau keuangan terhadap jumlah anggota komite audit keseluruhan. Selanjutnya, keahlian Komite Audit disimbolkan dengan ACEF

$$ACEF = \frac{\text{Jumlah Anggota Komite Audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi/keuangan}}{\text{Jumlah Anggota Komite Audit}}$$

3.1.2.5 Tipe Kepemilikan Perusahaan

Tipe kepemilikan perusahaan diukur menggunakan *dummy variable*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2013), penelitian ini membagi tipe kepemilikan perusahaan menjadi tiga kategori, yaitu BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. karena variabel independen tipe kepemilikan ini dibagi menjadi tiga kategori, maka variabel *dummy* yang digunakan ada dua, yaitu:

1. Perusahaan BUMN. Apabila perusahaan merupakan BUMN, maka diberi kode 1. Apabila perusahaan merupakan nonBUMN maka diberi kode 0.
2. Perusahaan asing. Apabila perusahaan merupakan milik perusahaan asing, maka diberi kode 1. Apabila perusahaan bukan milik perusahaan asing, maka diberi kode 0.

Selanjutnya, Tipe kepemilikan perusahaan disimbolkan dengan : ASING dan BUMN

BUMN = perusahaan BUMN atau nonBUMN

ASING = perusahaan asing atau nonasing

3.2 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi tersebut digunakan untuk memperbanyak sampel penelitian mengingat sangat sedikit perusahaan yang sukarela mencantumkan *audit fees* dalam laporan tahunan perusahaannya.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria yang ditentukan adalah:

1. Perusahaan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2013.
2. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen untuk periode 2013.
3. Laporan tahunan perusahaan mencantumkan *audit fees*
4. Perusahaan yang memiliki data yang lengkap pada laporan keuangan dan laporan tahunan untuk digunakan dalam penelitian.

3.3 JENIS DAN SUMBER DATA

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Yaitu data yang didapat dari sumber tertentu dan peneliti tidak terjun langsung di lapangan. Alasan menggunakan data sekunder karena data lebih mudah didapatkan serta tidak memakan banyak biaya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan keuangan auditan semua perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013. Data ini diperoleh dari Pojok BEI Undip dan situs resmi BEI, yaitu www.idx.com

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Data dikumpulkan dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari sumber data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan. Data-data ini diperoleh dari Pojok BEI Undip, website Bursa Efek Indonesia (www.idx.com) dan berbagai macam literatur lainnya.

3.5 METODE ANALISIS

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum (Ghozali, 2011). Analisis ini digunakan untuk memberikan deskripsi tentang variabel yang diteliti yaitu Komite audit, tipe kepemilikan perusahaan, dan *audit fees* yang dapat dilihat dari jumlah data, angka rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Jika distribusi residual tidak normal, maka uji statistik akan tidak valid jika memiliki jumlah sampel yang sedikit. Proses uji normalitas data dilakukan dengan dua cara (Ghozali, 2011) yaitu :

a) Dengan analisis grafik

Diperhatikan penyebaran data (titik) pada normal *p-plot of regression standardized residual* dari variabel dependen, dimana :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b) Dengan analisis statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dan memperhatikan penyebaran data (titik) pada *normal p-plot of regression standardized residual* dari variabel dependen, dimana :

1. Nilai signifikansi atau nilai probabilitass $< 0,05$ maka distribusi dikatakan tidak normal.
2. Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dikatakan normal.

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah tiap-tiap variabel independen saling berhubungan. Multikolonieritas terjadi ketika tiap-tiap variabel independen terdapat hubungan. Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas atau tidak, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi cukup tinggi (di atas 0.90), maka ini merupakan indikasi terjadinya multikolonieritas (Ghozali, 2011)
- b) Dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah = nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah $tolerance \leq 0.10$ atau sama dengan $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2011)

3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda. Uji Heteroskedastisitas dilihat dengan menggunakan dua cara, antara lain:

- a) Melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Apabila pola pada grafik ditunjukkan dengan titik-titik menyebar secara acak (tanpa pola yang jelas) dan tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b) Menggunakan Uji Park. Jika probabilitas signifikan $> 0,05$, maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda (*Multiple Regression*) dengan alasan bahwa variabel independennya lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara fee audit dengan variabel komite audit dan tipe kepemilikan perusahaan. Persamaan regresinya yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{LNFEED} = \alpha + \beta_1(\text{ACSIZE}) + \beta_2(\text{ACMEET}) + \beta_3(\text{ACINDP}) + \beta_4(\text{ACEF}) + \beta_5(\text{BUMN}) + \beta_6(\text{ASING}) + \varepsilon$$

Keterangan :

LNFEED	: <i>Audit fees</i> perusahaan
ACSIZE	: Ukuran Komite Audit
ACMEET	: Intensitas pertemuan Komite Audit
ACINDP	: Independensi Komite Audit
ACEF	: Keahlian Komite Audit
BUMN	: <i>Dummy</i> perusahaan BUMN atau nonBUMN
ASING	: <i>Dummy</i> perusahaan Asing atau perusahaan nonAsing
ε	: Error

Kemudian untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen dengan *Audit fees*, maka dilakukan pengujian-pengujian hipotesis penelitian dengan pengujian dibawah ini :

3.5.3.1 Uji koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) antara nol dan satu. Jika nilai koefisien determinasi kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Jika nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (cross section) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data time series biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011).

3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (F)

Uji statistik F menunjukkan semua variabel independen yang dimasukkan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima yang berarti secara bersama-sama variabel ACSIZE, ACMEET, ACINDP, ACEF, ASING, BUMN berpengaruh terhadap *fee* audit.
2. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak yang berarti secara bersama-sama variabel ACSIZE, ACMEET, ACINDP, ACEF, ASING, BUMN berpengaruh terhadap *fee* audit.

3.5.3.3 Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel (Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.